

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, S., 2015, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book, Jakarta
- Damping, N.M., 2019, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta Timur
- Handoyo, E., 2013, *Pendidikan Antikorupsi*, Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta
- Hatta, M., 2019, *Kejahatan Luar Biasa*, Unimal Press, Lhokseumawe
- Hieriej, E.O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Huda, C., 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Prenada Media, Jakarta
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lubis, F., 2020, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, C.V Manhaji, Medan
- Mertokusumo, S., 2007, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Moloeng, L.M., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Rodliyah & Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Suhartono, I., *Metode Penelitian Sosial dan Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sukardi, 2015, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, Top Indonesia, Pontianak

Sulastri L., & Wibowo, K.T., 2020, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, Gracias Logis Kreatif, Ponorogo

Suyanto, H., 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Umar, N., 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN Ambon, Ambon

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kode Etik Advokat Indonesia Disahkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst perihal Putusan Pertama Perkara Fredrich Yunadi, 28 Juni 2018

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst. perihal Putusan Pertama perkara Lucas, 20 Maret 2019

Jurnal

Bijayanti, K.I., & Darmadi, A.A.N.O.Y., "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 4, 2020

Gareda, M.S., "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. Tahun 2001", *Lex Crimen*, volume 4 No. 1, 2015

Gherman, M., & PETERSCHI, E., "Scientific Interpretations Of Offenses Of Falsification Of Evidence At Internasional Level And In The Context Of International Law", *Revistă științifico-practică nr. 2*, 2021

- Gulo, N., & Muharram, A.K., “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No.3, 2018
- Hakim, L., “Implementasi Teori Dualitas Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, Jurnal Kertha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, 2019
- Heriyono, “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 2, No. 2, 2014
- Huda, C., “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, Jurnal Hukum Vol. 18, no. 4, 2018
- Ingkiriwang, Y., “Perluasan Ajaran Penyertaan Dan Tanggung Jawab Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, Vol. V, No. 4, 2016
- Kesuma, D.A., “Kategori Dan Tahapan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum, Dalam Upaya Penerapan Sanksi Pidana Bagi Barang Siapa Yang Menyimpangi Delik Obstruction Of Justice”, : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, vol. 28, No. 4, 2022
- Krisnowo, R.D.A.P., & Sianturi, R.M., “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien”, Jurnal Jendela Hukum Vol. 9 No.1, 2022
- Putra, D.S., Ginting, R., “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan.”, Recidive Vol. 7, No. 4, 2018
- Rakinaung, V.Y., “Kajian Hukum Terhadap Pengacara Yang Dengan Sengaja Menghalangi, Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan Serta Proses Peradilan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi.”, Lex Crimen VIII, No. 4, 2019
- Rompis, F.M., “Kewenangan Advokat Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu”, *Lex et Societatis*, volume 1 No. 2, 2013
- Tarek, F.M.T., “Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Sampai Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi,” Lex Crimen Vol. 8, No. 3, 2019
- Utoyo, M., *et.al*, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No.1, 2020



Penulisan Hukum

Oktavianti, R., 2019, *Obstruction Of Justice oleh advokat Terhadap Penyelidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid-Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst)*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2019

Website

Deborah C. England, “Obstruction Of Justice”, <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/crime-penalties/what-criminal-obstruction-what-penalties>, diakses 1 Januari 2023

Haris Azhar, “Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2023

MKRI, “Kewenangan Menilai Iktikad Baik Advokat Terletak pada Penegak Hukum”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15095>, diakses 12 Juni 2023

Sayap Bening, “Macam-Macam Sistem Hukum Di Dunia”, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-macam-macam-sistem-hukum-di-dunia>, diakses 5 Juli 2023

Eddy Cahyono Sugiarto, “G20 dan Pemberantasan Korupsi”, https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi, diakses 27 Mei 2023

United Nations, “Signature and Ratification status”, <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html>, diakses 5 Juli 2023

Alif, “Seminar Diseminasi Konvensi PBB Antikorupsi – UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)”, <https://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-401-seminar-diseminasi-konvensi-pbb-antikorupsi--uncac-united-nations-convention-against-corruption.html>, diakses 6 Juli 2023

United Nations, “United Nations Convention Against Corruption”, <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>, diakses 6 Juli 2023